



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

	Hal
IKHTISAR	1
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1. Dasar Pembentukan Organisasi	3
1.2. Aspek Startegis dan Permasalahan Utama	3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.4. Struktur Organisasi	6
1.5. Sumber Daya Manusia.....	8
1.6. Sarana dan Prasarana.....	11
BAB II	
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	14
1. Visi dan Misi.....	14
2. Tujuan dan Sasaran	15
3. Strategi dan Kebijakan.....	15
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	17
2.3. Perjanjian Kinerja	19
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	21
3.2 Realisasi Anggaran.....	26
BAB IV	
PENUTUP	28
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau (Bapenda) bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Bapenda berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2017 dan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sistematika penyajian berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bapenda telah berupaya melaksanakan fungsi dan tugas yang diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Kabupaten Berau . Bapenda, sebagai salah satu komponen perangkat daerah dituntut dan berperan membantu Kepala Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Dari analisis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur, dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran yang telah ditetapkan secara umum telah tercapai 94,82 % (dengan predikat sangat tinggi) dari target sebesar 100%.

Dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang maksimal, Bapenda terus berusaha melaksanakan fungsi dan ketugasan dengan sebaik mungkin dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan secara optimal melalui peran, fungsi dan ketugasan pengelolaan pendapatan daerah. Pencapaian kinerja yang ada mungkin belum memuaskan semua pihak, namun demikian kinerja tersebut adalah kinerja terbaik yang dapat kami sajikan dengan segala keterbatasan yang ada. Kondisi ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan dimasa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas

kinerja untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan seluruh program tidak terlepas dari pengaruh keadaan, dukungan dan peran serta seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders). Umpan balik (feed back) atas segala yang kami sajikan dan saran - saran sangat kami harapkan guna peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Bapenda kami ucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Kabupaten Berau.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau yang selanjutnya disingkat dengan Bapenda adalah unsur pelaksana pemerintahan kabupaten yang tugas dan fungsinya berkaitan erat dengan pengelolaan pendapatan daerah, memerlukan suatu sistem penyelenggaraan yang efektif, efisien dan akuntabel, sehingga penerimaan pendapatan daerah dapat tergali secara maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan daerah.

1.2. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

Kinerja pemungutan pajak pada prinsipnya dipengaruhi oleh dua hal yaitu : Pertama, adanya kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : adanya kesadaran dalam membayar pajak yang tumbuh sebagai suatu budaya dalam suatu komunitas, adanya manfaat yang dapat dirasakan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari pembayaran pajak, pelayanan oleh Bapenda serta *law enforcement*. Kedua, penggalian potensi pajak. Penggalian potensi pajak dilakukan melalui kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Tugas Bapenda adalah melaksanakan hukum pajak yang diundangkan dalam Peraturan Daerah melalui suatu administrasi pajak. Administrasi pajak (*tax administration*) dan hukum pajak (*tax law*) merupakan satu kesatuan sebagai suatu sistem pajak (*tax system*).

Oleh karena itu, administrasi pajak yang baik harus mampu menegakkan ketentuan - ketentuan hukum perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan Perpajakan Daerah. Secara teoritis administrasi pajak merupakan operasionalisasi hukum pajak. Dalam pelaksanaan administrasi pajak dibutuhkan rambu – rambu berupa petunjuk pelaksanaan serta peraturan teknis lainnya sebagai pedoman, baik oleh aparat pajak (fiskus) maupun Wajib Pajak. Untuk dapat melakukan penggalan pajak yang optimal, maka administrasi perpajakan harus mampu mengadministrasikan penerimaan pajak, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak (baik kepada petugas pajak maupun Wajib Pajak), memberikan pelayanan pajak yang baik, serta adanya persamaan perlakuan kepada semua Wajib Pajak (adil) dalam *law enforcement*.

Efektifitas pemungutan pajak merupakan *output* dan *outcome* dari kegiatan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah untuk menimbulkan efek kepatuhan, serta terpenuhinya pelayanan terhadap hak – hak Wajib Pajak untuk menimbulkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka ditentukan Aspek Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sebagai berikut :

1. Dengan Sumber Daya Manusia yang handal mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada Wajib Pajak;
2. Dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
3. Dengan pengadaan sarana dan prasarana yang baik akan memberikan pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak;
4. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan dibidang Pajak Daerah melalui sosialisasi secara berkelanjutan.

Sedangkan permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam upaya optimalisasi pendapatan;
4. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah;
5. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Kabupaten Berau . Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sebagai salah satu komponen perangkat daerah dituntut dan berperan membantu Kepala Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan

2. Fungsi

Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e) Pelaksanaan UPTD;
- f) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

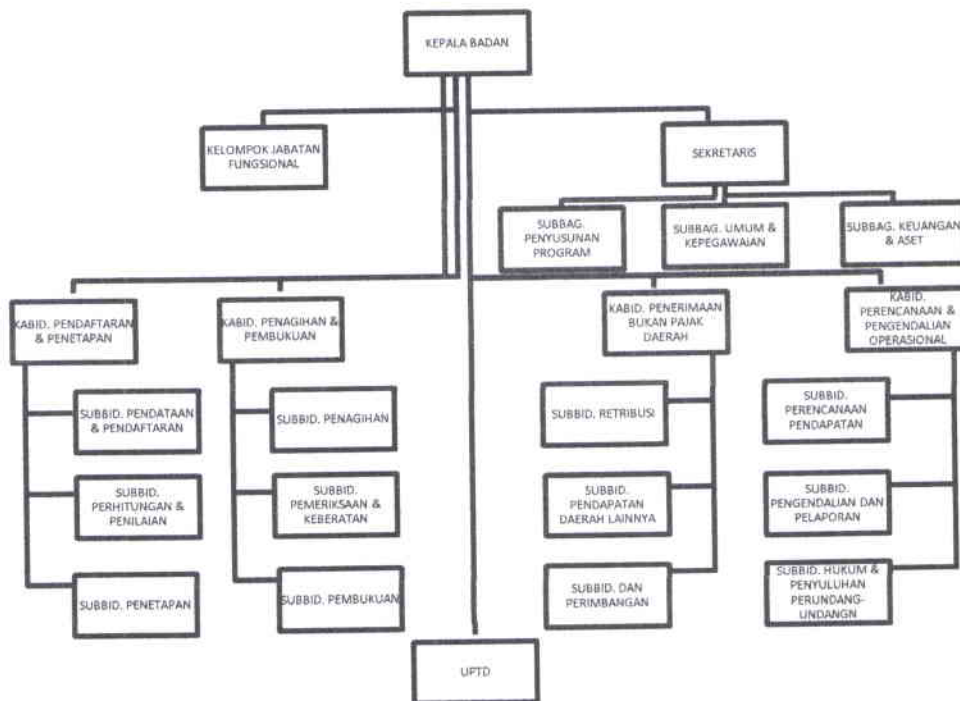
1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Kabupaten Berau , terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Pendaftaran dan Penetapan , terdiri dari :
 - a) Subbid Pendataan dan Pendaftaran
 - b) Subbid Perhitungan dan Penilaian
 - c) Subbid Penetapan
4. Bidang Penagihan dan Pembukuan, terdiri dari :
 - a) Subbid Penagihan
 - b) Subbid Pemeriksaan dan Keberatan
 - c) Subbid Pembukuan
5. Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah , terdiri dari :
 - a) Subbid Retribusi
 - b) Subbid Pendapatan Daerah lainnya
 - c) Subbid Dana Perimbangan
6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, terdiri dari :
 - a) Subbid Perencanaan Pendapatan
 - b) Subbid Pengendalian dan Pelaporan
 - c) Subbid Hukum dan Penyuluhan Perundang-undangan

Secara garis besar, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAU



1.5. Sumber Daya Manusia

a. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau pada akhir bulan Desember tahun 2017 sebanyak 64 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 45 orang dan tenaga kontrak sebanyak 19 orang. Kondisi pegawai secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau .

NO.	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	45	70,00
2.	Tenaga Kontrak	19	30,00
	JUMLAH	64	100,00

1) Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah, maka pengisian formasi jabatan struktural di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau terdiri dari Eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 21 orang. Sementara itu sampai dengan saat ini untuk kelompok jabatan fungsional di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau masih belum terisi. Struktur jabatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah yang Menduduki Jabatan dan Staf .

NO.	JABATAN/STAF	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Eselon II -b	1	1,56
2.	Eselon III-a	1	1,57
3.	Eselon III-b	4	6,25
4.	Eselon IV	15	23,44
5.	Staf	24	37,50
6.	Tenaga Kontrak	19	29,69
	JUMLAH	64	100,00

2) Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Berdasarkan data dari 45 jumlah pegawai yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau, terdapat 6 orang (13,33%) pegawai Golongan IV, 25 orang (55,56%) pegawai golongan III, 13 orang (28,89%) pegawai golongan II dan 1 orang (2,22%) pegawai golongan I dari jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. Apabila dilihat dari golongan/pangkat, maka pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil Golongan III, yaitu sebesar 55,56%. Oleh karena itu pola pembinaan dan pengarahan disesuaikan dengan kondisi mayoritas PNS golongan III. Selengkapnya gambaran mengenai jumlah PNS berdasarkan golongan/pangkat dapat dilihat dalam Tabel 1.3 dan Tabel 1.4.

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau berdasarkan Golongan .

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	%
1.	IV	6	13,33
2.	III	25	55,56
3.	II	13	28,89
4.	I	1	2,22
	JUMLAH	45	100,00

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin

GOL/ RUANG	SEKRET ARIAT		BIDANG PENDAF TARAN & PENETA PAN		BIDANG PENAGIH AN & PEMBUK UAN		BIDANG PENERI MAAN BUKAN PAJAK DAERAH		BIDAN P20		JUMLAH		TO TA L
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a													
I/b							1				1		1
I/c													
I/d													
II/a													
II/b				1	1		1				2	1	3
II/c			5				1		1		7		7
II/d	1	1	1								2	1	3
III/a		1							1		1	1	2
III/b	2	4						1			2	5	7
III/c		2	2		1		1				4	2	6
III/d	1	1	1		1	1	1	1	1	2	5	5	10
IV/a			1			1	1		1		3	1	4
IV/b		1										1	1
IV/c		1										1	1
IV/d													
IV/e													
Tenaga Kontrak	3	1	5	3	3	1	2	1			13	6	19
JUMLAH	7	12	15	4	6	3	8	3	4	2	40	24	64
TOTAL	19		19		9		11		6		64		

3) Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah yang ada, maka komposisi pegawai dengan status pendidikan Strata-1 lebih mendominasi yaitu sebesar 51,56%, sedangkan untuk pegawai Strata-2 sebesar 6,25%, Sarjana Muda/DIII sebesar 1,56%, SLTA sebesar 35,93%, SMP sebesar 3,13%. dan SD sebesar 1,56%. Berdasarkan data latar belakang pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah, terlihat bahwa mayoritas pegawai lulusan Strata-1 yaitu sebesar 51,56%, sehingga pola pembinaan pegawai dilakukan dengan mengacu pada tingkat pendidikan pegawai lulusan Strata-1.

Selengkapnya data latar belakang pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan .

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Strata-2 (S2)	4	6,25
2.	Strata-1 (S1)	33	51,56
3.	Sarjana Muda / DIII	1	1,56
4.	SLTA/SMK	23	35,94
5.	SLTP	2	3,13
5.	SD	1	1,56
	JUMLAH	64	100,00

1.6. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, disamping sumber daya manusia yang profesional. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau (Desember 2017) belum memiliki gedung sendiri yang cukup *representatif* untuk pelaksanaan tugas, demikian halnya juga dengan sarana dan prasarana kantor. Pada saat ini, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau berlokasi di Jalan APT. Pranoto Tanjung Redeb. Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 1.6. berikut :

Tabel 1.6. Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Ket.
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan Roda 4	6	B			
2.	Kendaraan Roda 2	29	B			
3.	UPS	18	B			
4.	CPU	4	B			

5.	Kursi	85	B			
6.	Kursi	3			RB	
7.	Kursi Komputer	1	B			
8.	Meja Kayu	6	B			
9.	Printer	15			RB	
10.	Printer	23	B			
11.	Mesin Ketik	4	B			
12.	Meja Komputer	14	B			
13.	PC. Unit	3			RB	
14.	PC. Unit	42	B			
15.	Meja ½ Biro	2			RB	
16.	Meja ½ Biro	2	B			
17.	Meja	71	B			
18.	Filling Besi	9	B			
19.	Televisi	1	B			
20.	Televisi	7	B			
21.	Rak Koran	1	B			
22.	Stavolt	3			RB	
23.	UPS	1			RB	
24.	PC. Unit	1			RB	
25.	AC	4			RB	
26.	AC Unit	6	B			
27.	Lemari Dispenser	6	B			
28.	Lemari Arsip	5	B			
29.	Mesin Foto Copy	1			RB	
30.	Mesin Foto Copy	1	B			
31.	Lemari Kulkas	2	B			
32.	Lemari	13	B			
33.	Lemari Es	2	B			
34.	Meja TV	2	B			
35.	Camera Digital	2	B			
36.	Mesin Perforasi	1	B			
37.	Mesin Perforasi Manual	1	B			
38.	Mesin Perforasi	1			RB	
39.	Speaker Simda	1	B			
40.	Speaker	2		KB		
41.	Speaker Simda	1	B			
42.	Note Book	6	B			
43.	Lemari Kayu	6	B			
44.	Jam Dinding	3	B			
45.	Printer Flotter	1	B			
46.	Dispenser	1	B			
47.	Layar Monitor	1	B			
48.	Dispenser	2	B			
49.	Server IBM	1			RB	
50.	Server	2	B			
51.	Router	1	B			

52.	Meja Tamu	1	B			
53.	Papan Tulis	1	B			
54.	Proyektor/Infocus	1	B			
55.	GPS	1	B			
56.	Mesin Porforasi	1	B			
57.	Laptop	2	B			
58.	Mesin Genset	1	B			
59.	Sofa dan Aksesoris Pelayanan	2	B			
60.	Tenda	1	B			
61.	Komputer PC/PC Unit	5	B			
62.	Printer	7	B			
63.	Scanner	1	B			
64.	TOA	1	B			
65.	Kursi Lipat	15	B			
66.	Televisi	1	B			
67.	CCTV	1	B			
68.	Mainboard(Mesin P7210) Cartridge Ribbon Printer	1	B			
69.	Papan Nama Instansi Gedung Terpadu	1	B			
70.	Perangkat Lunak Retribusi Pemakaian Kekayaan	1	B			

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk diimplementasikan seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sebagaimana disebutkan dalam Inpres nomor 7 tahun 1999 bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Di dalam Rencana Stratejik setidaknya mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 ini berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau tahun 2016 sampai 2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau tahun 2016 sampai 2021.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi Badan Pendapatan Kabupaten Berau tahun 2016 sampai 2021 adalah :

“Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Semakin Mapan Guna Mendukung Pembangunan di Segala Bidang”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Misi Badan Pendapatan Pengelolaan Kabupaten Berau tahun 2016 sampai 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah;

2. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang baik dan benar;;
3. Meningkatkan mutu pelayanan;
4. Meningkatkan kualitas SDM;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Visi dan Misi dengan mempertimbangkan isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan daerah ;
2. Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan ;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2016 - 2021) dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada :

1. Peningkatan pendapatan daerah ;
2. Peningkatan tata kelola pendapatan daerah Peningkatan kualitas kelembagaan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Berkenaan dengan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah, maka dirumuskan strategi dan kebijakan untuk setiap misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sebagai berikut :

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Pertama, yaitu "Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah", Kebijakannya adalah :

1. Pendataan potensi wajib pajak daerah;
2. Pendataan potensi wajib retribusi daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
4. Intensifikasi retribusi daerah, peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah;
5. Peningkatan sistem pengawasan intern di bidang pendapatan daerah;

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Kedua, yaitu "Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Pendapatan Daerah", Kebijakannya adalah :

1. Peningkatan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT;
2. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kepada wajib pajak;
3. Peningkatan Jumlah UPTD Bapenda;
4. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif;

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Ketiga, yaitu "Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat", Kebijakannya adalah :

1. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima;
3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
4. Peningkatkan koordinasi dan evaluasi antar SKPD yang terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah;

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Keempat, yaitu "Peningkatan dan Pengembangan Kualitas, Kinerja dan Kuantitas SDM", Kebijakannya adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

2. Pemenuhan kuantitas sumber daya manusia di setiap unit kerja;
3. Peningkatan pemberdayaan SDM secara optimal;
4. Penataan kelembagaan organisasi;

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Kelima, yaitu "Peningkatan Sarana dan Prasarana", Kebijakannya adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat kecukupan dan kelayakan;
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan;

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang memuat informasi tentang Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam Tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran serta rencana capaian/target.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target sebelum Review renstra	Target setelah Review renstra

1	Peningkatan Pendapatan Daerah	Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah	30,5 M 7,8 M 12 Laporan 46 Kelurahan/ Kampung 30 WP 1 Dokumen 2 Laporan	30,5 M 7,8 M 12 Laporan 46 Kelurahan/ Kampung 30 WP 1 Dokumen 2 Laporan
		Prosentase penerimaan DBH Pajak & SDA	5 raperda/ raperbup 576,4 M	5 raperda/ raperbup 576,4 M
2	Peningkatan Tata Kelola Pendapatan daerah	Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	4 Sistem	4 Sistem
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	Jumlah SDM Sesuai Dengan Kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	2 Orang	2 Orang
		Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan	6 Orang	6 Orang
4	Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat Kecukupan dan Kelayakan	10 Unit	10 Unit

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 ditetapkan dalam rangka mewujudkan komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk : Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Menilai keberhasilan organisasi. Dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Pendapatan Daerah	Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah	30,5 M
		Prosentase penerimaan DBH Pajak & SDA	1,34 T

		Prosentase penerimaan lain-lain pendapatan yang sah	576,4 M
2	Peningkatan Tata Kelola Pendapatan daerah	Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	2 Sistem
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	Jumlah SDM Sesuai Dengan Kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	15 Orang
		Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan	6 Orang
4	Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat Kecukupan dan Kelayakan	32 Unit

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2016 dengan realisasinya. Dari 3 jenis sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - Pajak Daerah
 - Retribusi Daerah
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
 - Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
 - Dana Alokasi Umum
 - Dana Alokasi Khusus
3. Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah
 - Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - Sumbangan pihak ketiga
 - Pendapatan hibah

Adapun sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau adalah Tercapainya penerimaan daerah secara optimal, maka dalam Tahun Anggaran 2017 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau telah mengkoordinasikan penerimaan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar Rp 250.791.459.650,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp224.455.683.689,17 atau 89,50 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Pencapaian Sasaran Tahun Anggaran 2017

Indikator Sasaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	250.791.459.650,00	224.455.683.689,17	89,50%
Dana Perimbangan	1.267.424.645.998,00	1.186.720.354.749,00	93,63%
Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah	427.379.637,00	438.295.931.000,00	102,55%

Data yang sama pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pencapaian Sasaran Tahun Anggaran 2016

Indikator Sasaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	198.340.920.000,00	207.575.307.056,03	103,80%
Dana Perimbangan	1.435.083.367.765,00	1.499.951.957.487,00	104,52%
Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah	294.375.621.000,00	293.441.989.800,00	99,68%

Dari 11 (sebelas) jenis pajak yang ditargetkan sebesar Rp 42.777.056.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 48.728.109.332,15 (113,91%). Jenis-jenis pajak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Pencapaian 11 (Sebelas) Jenis Pajak Tahun Anggaran 2017

Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Hotel	4.000.000.000,00	4.740.104.016,00	118,50%
Pajak Restoran	13.500.183.000,00	16.556.320.421,00	122,64%
Pajak Hiburan	200.000.000,00	331.751.935,00	165,88%
Pajak Reklame	200.000.000,00	186.092.902,00	93,05%
Pajak Penerangan Jalan	13.954.147.000,00	15.458.524.789,00	110,78%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	87.570.203,00	17,51%
Pajak Parkir	2.726.000,00	940.000,00	34,48%
Pajak Air Tanah	70.000.000,00	41.393.308,00	59,13%
Pajak Sarang Burung Walet	850.000.000,00	1.002.918.000,00	117,99%
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P2	3.000.000.000,00	2.563.666.934,00	85,46%
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.500.000.000,00	7.758.826.824,15	119,37%

Dari 16 (enam belas) jenis retribusi yang ditargetkan sebesar Rp12.667.454.100,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 14.668.769.119,87 (115,62%). Pencapaian dari beberapa jenis retribusi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Pencapaian Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017

Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Dinas Kesehatan	2.770.000.000,00	3.550.999.500,00	128,19%
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.000.000,00	716.730.000,00	238,91%
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	543.500.000,00	639.384.000,00	117,64%
Retribusi Pelayanan Pasar	2.636.000.000,00	1.992.299.534,00	75,58%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	207.680.000,00	278.415.000,00	134,06%
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	3.224.687.000,00	3.417.156.325,00	105,97%
Retribusi Tempat Pelelangan	182.950.000,00	262.673.600,00	143,58%
Retribusi Jasa Usaha Terminal	7.700.000,00	0,00	0,00 %
Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00	10.123.000,00	101,23%
Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	170.000.000,00	218.892.500,00	128,76%
Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhan	333.178.700,00	339.818.210,00	101,99%
Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	35.000.000,00	64.200.000,00	183,43%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.300.000.000,00	1.715.426.500,87	131,96%
Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	750.000.000,00	1.245.133.050,00	166,02%
Retribusi Izin Trayek	24.000.000,00	24.400.000,00	101,67%
Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing	192.758.400,00	193.117.900,00	100,19%

Penerimaan pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari :

Tabel 3.5. Pencapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2017

Jenis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PT. Hutan Sanggam Labanan Lestari	600.000.000,00	359.124.119,00	59,85%
PLTU (PT. Indo Pusaka Berau)	2.500.000.000,00	1.236.970.000,00	49,48%
Bankaltim (Deviden)	25.409.843.200,00	25.409.843.199,83	100,00%
PDAM Tirta Segah	2.105.254.000,00	0,00	0,00%

Dari penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :

Tabel 3.6. Pencapaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Tahun Anggaran 2017

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	530.000.000,00	620.240.485,91	117,03%
Penerimaan Jasa Giro	8.496.000.000,00	5.923.594.056,74	69,72%
Penerimaan Bunga Deposito	63.625.994.000,00	31.840.939.008,45	50,04%
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	160.000.000,00	411.609.274,67	257,25%
Pendapatan Denda	377.212.550,00	573.437.179,26	152,02%
Penerimaan BLUD	54.780.000.000,00	47.781.793.456,72	87,22%
Penerimaan Lain-lain	32.146.820.000,00	41.573.703.294,57	129,32%
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	4.595.825.800,00	5.327.551.162,00	115,92%

Dari penerimaan Dana Perimbangan :

Tabel 3.7. Pencapaian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2017

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	576.385.221.998,00	524.817.314.972,00	91,05%
Dana Alokasi Umum	540.531.902.000,00	540.531.902.000,00	100,00%
Dana Alokasi Khusus	150.507.522.000,00	121.348.327.977,00	80,63%

Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8. Pencapaian Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran
2017

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	290.231.195.000,00	302.047.238.000,00	104,07%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53.041.955.000,00	53.041.955.000,00	100,00%
Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.466.250.000,00	84.804.125.000,00	89,77%
Dana Desa dan Desa Adat	84.106.487.000,00	83.206.738.000,00	98,93%

Adapun hasil pencapaian target indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau untuk tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.9. Hasil Pencapaian Target Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah	30,5 M	35,034 M	114,9
	7,8 M	10,002 M	128,2
	12 Laporan	12 Laporan	100
	46 Kelurahan/ Kampung	46 Kelurahan/ Kampung	100
	30 WP	60 WP	200
	2 Laporan	2 Laporan	100
	5 raperda/ raperbup	9 raperda/ raperbup	180
Prosentase penerimaan DBH Pajak & SDA	576,4 M	524,8 M	91,05
Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	4 Sistem	3 Sistem	75
Jumlah SDM Sesuai Dengan Kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	15 Orang	15 Orang	100
Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan	6 Orang	7 Orang	116,7
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat Kecukupan dan Kelayakan	10 Unit	10 Unit	100

3.2. Realisasi Anggaran

Pendapatan Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Komposisi Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan Program dan Kegiatan.

Kondisi Belanja Tidak Langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 7.848.174.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 7.199.927.299,00 atau sebesar 91,74%. Sedangkan kondisi Belanja Langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 6.475.912.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 5.137.939.484,00 atau sebesar 79,33%. Sehingga total alokasi anggaran yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 14.324.086.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 12.337.866.783,00 atau sebesar 86,13%. Secara lebih rinci realisasi anggaran dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	412.000.000	396.465.241	96,23
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	236.672.000	175.902.709	74,32
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	171.656.000	163.442.000	95,21
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	121.000.000	120.560.120	99,64
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30.000.000	29.243.400	97,48
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	160.000.000	146.373.181	91,48
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	544.650.000	433.898.000	79,67
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.956.000	97,80
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	19.221.500	76,89
	Penyediaan Makanan dan Minuman	200.000.000	130.865.000	65,43

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	550.000.000	547.174.270	99,49
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	187.500.000	147.100.000	78,45
	Penyediaan Jasa Adminitrasi / Tekhnis Perkantoran	64.900.000	64.900.000	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	185.000.000	179.299.491	96,92
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	90.000.000	70.397.983	78,22
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	667.000.000	570.226.488	85,49
	Pemutakhiran Data PBB	414.000.000	316.370.340	76,42
	Penagihan Pajak Daerah	720.000.000	583.827.956	81,09
	Penagihan PBB dan BPHTB	345.000.000	228.802.000	66,32
	Pembinaan dan Pengawasan Wajib pajak dan Retribusi Daerah	292.000.000	111.039.100	38,03
	Optimalisasi Penerimaan Dana Pendapatan Transfer	100.000.000	93.522.810	93,52
	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah	100.000.000	88.659.244	88,66
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	857.534.000	518.692.651	60,49

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) terlihat dalam pengukuran pencapaian kinerja yang signifikan sesuai dengan sasaran strategis yang telah dirancang.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya yang ada melalui pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Dari analisis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur, dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran yang telah ditetapkan tercapai 94,82 % (dengan predikat sangat tinggi) dari target sebesar 100%. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat dan memberikan gambaran dalam pengukuran capaian kinerja tahun 2017, sehingga dapat dimanfaatkan baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, 29 Januari 2018

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Berau,**



Ir. Hj. Maulidiyah M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680608 199303 2 007

LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Hj. Maulidiyah, M. Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Berau

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Muharram, S.Pd, MM

Jabatan : Bupati Berau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 6 Februari 2017

Pihak kedua
Bupati Berau



H. Muharram, S.Pd, MM

Pihak Pertama
Kepala
Badan Pendapatan Daerah Berau



Ir. Hj. Maulidiyah, M. Si
NIP. 19680608 199303 2 007

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2,163,956,000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 35,000,000	
3	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp 2,245,000,000	
4	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp 437,500,000	

Tanjung Redeb, 6 Februari 2017



 Bupati Berau



H. Muharram, S.Pd, MM



 Kepala Badan



D. Hj. Maulidiyah, M. Si

 NIP. 19680608 199303 2 007

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran : 2017

(1) Sasaran Strategis	(2) Indikator Kinerja	(3) Target	(4) Realisasi	(5) %	(6) Program / Kegiatan	(7) Target	(8) Realisasi	(9) %
Peningkatan pendapatan daerah	Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah	2,226 WP/WR 46 Kampung 30.5 M 7.8 M 30 WP/WR	3,101 WP/WR 46 kampung 35.034 M 10.002 M 60 WP/WR	139,3 100 114,9 128,2 200	Pengalihan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Pemutakhiran Data PBB Penagihan Pajak Daerah Penagihan PBB dan BPHTB Pembinaan dan Pengawasan Wajib pajak dan Retribusi Daerah Penyusunan peraturan perundang undangan pendapatan daerah Optimalisasi Penerimaan Dana Pendapatan Transfer	667.000.000 414.000.000 720.000.000 345.000.000 292.000.000 100.000.000 100.000.000	570.226.488 316.370.340 583.827.956 228.802.000 111.039.100 88.659.244 93.522.810	85,49 76,42 81,09 66,32 38,03 88,66 93,52
Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Daerah	Prosentase penerimaan DBH Pajak & SDA	4 Sistem 576.4 M	3 Sistem 524,8	75 91,05	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	857.534.000	518.692.651	60,49
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM	Jumlah SDM Sesuai Dengan Kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	15 Orang	15 Orang	100	Penyediaan Jasa Administrasi / Tekhnis Perkantoran	64.900.000	64.900.000	100,00
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat	6 Orang 32 Unit	7 Orang 32 Unit	116,7 100	Pendidikan dan Pelatihan Formal Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	90.000.000 236.672.000	70.397.983 175.902.709	78,22 74,32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

mlah Anggaran Tahun 2017 : Rp 6.475.912.000,00
mlah Realisasi Anggaran Tahun : Rp 5.137.939.484,00



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Hj. Maulidiyah, M. Si
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Berau
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Muharram, S.Pd, MM
Jabatan : Bupati Berau
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 7 Februari 2018

Pihak kedua
Bupati Berau


H. Muharram, S.Pd, MM

Pihak Pertama
Kepala Badan Pendapatan Daerah Berau


Ir. Hj. Maulidiyah, M. Si
NIP. 19680608 199303 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAU

Nama OPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau
Tahun : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan Pendapatan Daerah	Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah	242,728 M
		Prosentase penerimaan dana perimbangan	1,368 T
		Prosentase penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	304,487 M
2	Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Daerah	Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	3 Sistem
3	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM	Jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	15 Orang
4	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi syarat kecukupan dan kelayakan	32 Unit

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 2.309.056.000,-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 132.000.000,-	
3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 5.000.000,-	
4	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp 2.070.000.000,-	
5	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp 500.000.000,-	

Tanjung Redeb, 7 Februari 2018



 Bupati Berau



H. Muharram, S.Pd, MM



 Kepala Badan



Ir. Hj. Maulidiyah, M. Si

 NIP. 19680608 199303 2 007